

ANALISIS ALOKASI DAN REALISASI DANA KAMPUNG DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG NAFRI TAHUN 2022-2024

Ananda Dwi Merahabia¹

Transna Putra Urip²

Syamsidar Sinaga³

ABSTRACT

This study aims to analyze the allocation of Village Funds in supporting community empowerment in Nafri Village, Abepura District, Jayapura City in the 2022–2024 Fiscal Year, analyze the realization of Village Funds in supporting community empowerment in the same period, and analyze the conformity between the allocation and realization of Village Funds in supporting community empowerment in Nafri Village. This study uses a descriptive qualitative approach with the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The data collection technique was carried out through documentary study of official documents in the form of the Nafri Village Government Work Plan (RKP), the Nafri Village Budget (APBK), and the Nafri Village Budget Realization Report for the 2022–2024 Fiscal Year, supplemented by supporting documents in the form of laws and regulations and scientific literature. The results show that the allocation of Village Funds in Nafri Village experienced changes in development priorities each year. In 2022, the largest allocation was allocated to the Development Implementation Sector, while in 2023 and 2024 the budget priority shifted to the Government Administration Sector. The allocation for the Community Empowerment Sector increased in 2023 before experiencing adjustments in 2024. Based on the Budget Realization Report documents, all programs that had been budgeted in each sector showed a realization rate of 100%, indicating conformity between the planning documents and budget realization. Thus, the Village Fund in Nafri Village has been allocated and realized to support the implementation of community empowerment programs in accordance with the applicable planning and budget realization documents, although the allocation amount fluctuated each year. This study only analyzes the aspects of budget allocation and realization based on documentary study, so it does not measure the effectiveness or impact of empowerment programs on the socio-economic conditions of the community.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Fund Realization, Community Empowerment, APBK, Nafri Village

PENDAHULUAN

Pembangunan kampung merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, di mana kampung memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik, penggerak pembangunan, serta pusat pemberdayaan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi kampung semakin diperkuat melalui pemberian kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat. Dalam konteks Provinsi Papua, kebijakan Dana Kampung diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada kampung dalam mengelola keuangan berdasarkan kearifan lokal dan hak masyarakat adat. Pengelolaan keuangan kampung sendiri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi lima tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

³ Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

dengan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini juga berpijak pada konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat yang digunakan mengacu pada pemikiran Chambers (1987) yang menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus mampu memberikan ruang partisipasi aktif kepada masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Pemberdayaan harus dimulai dari pengakuan terhadap potensi lokal, kearifan tradisional, serta kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2011) merupakan proses peningkatan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, yang dalam kaitannya dengan Dana Kampung dapat didorong melalui pengelolaan dana yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dari sisi empiris, penelitian ini merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian Wakman (2021) tentang akuntabilitas keuangan kampung di Yalimo menemukan bahwa alur pelaporan keuangan kampung sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 37 Tahun 2017, meskipun mekanisme tersebut selalu terlambat dilaksanakan, dengan faktor penghambat meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Penelitian Longkotuy et al. (2023) tentang pengelolaan dana desa di Kampung Kmasen Sorong, serta Utama (2021) tentang pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, menemukan bahwa masih banyak kampung yang mengalami kendala dalam transparansi, akuntabilitas, kapasitas SDM, serta partisipasi masyarakat. Penelitian Safkaur (2024) yang berjudul *Implementation of Village Funds for Infrastructure Development in Nafri Village, Abepura District, Jayapura City* menunjukkan bahwa Dana Kampung di Kampung Nafri dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kampung melalui Dana Kampung dan Dana Prospek, namun penelitian tersebut berfokus pada aspek pembangunan infrastruktur. Penelitian Sapari et al. (2023) di Kampung Idadagi, Dogiyai, Papua Tengah, menunjukkan bahwa pengelolaan ADD telah mengikuti aturan petunjuk teknis, berjalan teratur dan terkendali, serta pelaporan realisasi dilakukan sesuai jadwal, dengan faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan sarana prasarana yang memadai. Penelitian Thesia et al. (2022) di Desa Wermit, Sorong Selatan, menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Kampung dapat dikatakan akuntabel, meskipun terdapat kendala kurangnya transparansi yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam berpartisipasi. Sementara itu, penelitian di luar Papua seperti Len (2025) di Desa Ngijo Kabupaten Malang, Openg (2025) di Desa Leraboleng Flores Timur yang menemukan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, Efendi (2025) di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung, Hartawan (2025) di Desa Sukasari Tasikmalaya, serta Salingkat (2022) di Desa Sibedi Kabupaten Sigi, semuanya memberikan gambaran yang beragam mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bahwa dalam periode 2022-2024, pengelolaan Dana Kampung di Kampung Nafri mengalami dinamika yang signifikan. Pada masa pandemi COVID-19, sebagian anggaran dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna menjaga daya beli masyarakat, dan kebijakan ini berdampak pada berkurangnya alokasi untuk pembangunan produktif dan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Nafri, jumlah alokasi Dana Kampung selama periode penelitian menunjukkan perkembangan setiap tahunnya, dengan perbedaan besaran alokasi yang mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pembangunan kampung dari tahun ke tahun. Selain itu, pendapatan kampung selama tahun 2022-2024 sebagian besar masih berasal dari dana transfer pemerintah, sedangkan Pendapatan Asli Kampung belum memberikan kontribusi yang signifikan, yang menunjukkan bahwa pembangunan Kampung Nafri masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Alasan penelitian ini menarik untuk dilakukan adalah karena penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis, yaitu menganalisis alokasi dan realisasi Dana Kampung dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Kampung Nafri Tahun Anggaran 2022-2024, dengan menggunakan dokumen resmi berupa RKP Kampung, APBK Kampung, dan Laporan Realisasi Anggaran untuk melihat kesesuaian antara alokasi dan realisasi Dana Kampung. Meskipun sudah ada penelitian sebelumnya di lokasi yang sama, yaitu penelitian Safkaur (2024), penelitian tersebut berfokus pada aspek pembangunan infrastruktur, sedangkan penelitian ini berfokus pada dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana alokasi dan realisasi Dana Kampung dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Kampung Nafri, serta diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara alokasi anggaran dengan realisasinya serta kontribusinya terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kampung Nafri, Pemerintah Distrik Abepura, dan Pemerintah Kota Jayapura dalam memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Kampung agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dana kampung dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi tanpa wawancara, observasi lapangan, maupun kuesioner. Objek penelitian adalah Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), serta Laporan Realisasi Anggaran Kampung Nafri Tahun Anggaran 2022–2024, ditambah dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan melalui empat tahapan model interaktif tersebut, dengan penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel perbandingan alokasi serta realisasi anggaran, dan fokus pada besaran alokasi, prioritas program, alokasi pada lima bidang belanja kampung, perubahan anggaran, tingkat penyerapan, kesesuaian alokasi dan realisasi, serta dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat, tanpa mengukur efektivitas atau dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Alokasi Dana Kampung Tahun 2022–2024 mengalami perubahan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, alokasi terbesar dialokasikan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp4.513.549.700 atau sekitar 55,74% dari total belanja kampung (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022). Pada tahun 2023, prioritas anggaran bergeser ke Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dengan alokasi sebesar Rp3.836.465.488 (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2023). Pada tahun 2024, alokasi bidang pemerintahan tetap menjadi yang terbesar sebesar Rp3.869.235.635, diikuti bidang pembangunan sebesar Rp2.968.666.942 (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2024). Total pendapatan Kampung Nafri selama periode 2022–2024 seluruhnya bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Kampung dan pendapatan lain-lain bernilai nol (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Pada tahun 2022 total pendapatan sebesar Rp8.098.258.200, menurun menjadi Rp7.004.627.488 pada tahun 2023 atau turun 13,50%, dan kembali meningkat menjadi Rp8.172.739.561 pada tahun 2024 atau naik 16,68% (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Realisasi Dana Kampung Tahun 2022–2024 seluruhnya menunjukkan tingkat realisasi sebesar 100% pada setiap bidang, yang menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024).

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Kampung Nafri Tahun 2022–2024

Uraian	2022	2023	2024	Pertumbuhan Tahunan (%)
Pendapatan Asli Kampung	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-
Pendapatan Transfer	Rp 8.098.258.200	Rp 7.004.627.488	Rp 8.172.739.561	2023: -13,50%; 2024: 16,68%
Pendapatan Lain-lain	Rp 0	Rp 0	Rp 0	-
Total Pendapatan	Rp 8.098.258.200	Rp 7.004.627.488	Rp 8.172.739.561	2023: -13,50%; 2024: 16,68%

Sumber : Dokumen RKP Kampung Nafri Tahun 2022–2024

Tabel 2. Perbandingan Belanja Kampung Tahun 2022–2024

Bidang Belanja	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 2.121.908.300	Rp 3.836.465.488	Rp 3.869.235.635
Pelaksanaan Pembangunan	Rp 4.513.549.700	Rp 1.863.343.360	Rp 2.968.666.942
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 587.292.900	Rp 492.447.120	Rp 629.250.984
Pemberdayaan Masyarakat	Rp 153.922.300	Rp 556.171.000	Rp 464.386.000
Penanggulangan Bencana	Rp 721.585.000	Rp 256.200.000	Rp 241.200.000
Total Belanja	Rp 8.098.258.200	Rp 7.004.627.488	Rp 8.172.739.561

Sumber : Dokumen RKP Kampung Nafri Tahun 2022–2024

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan mengalami peningkatan anggaran dari Rp2.121.908.300 pada tahun 2022 menjadi Rp3.836.465.488 pada tahun 2023 dan Rp3.869.235.635 pada tahun 2024, dengan kegiatan meliputi penghasilan tetap kepala kampung dan aparatur, jaminan sosial, operasional pemerintahan, tunjangan BAMUSKAM, operasional RT/RW, insentif kepala suku dan ondoafi, pembangunan kantor kampung, serta penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024).

Tabel 3. Perbandingan Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2022–2024

Tahun	Anggaran	Persentase Realisasi
2022	Rp 2.121.908.300	100%
2023	Rp 3.836.465.488	100%
2024	Rp 3.869.235.635	100%

Sumber : Dokumen RKP Kampung Nafri Tahun 2022–2024

Bidang Pelaksanaan Pembangunan mengalami fluktuasi dari Rp4.513.549.700 pada tahun 2022 menjadi Rp1.863.343.360 pada tahun 2023 dan Rp3.055.526.942 pada tahun 2024, dengan kegiatan meliputi bantuan pendidikan, penyelenggaraan PAUD, pelayanan kesehatan, Posyandu, pembangunan jalan desa, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan MCK, sanitasi, penyediaan air bersih, pembangunan Pustu, pembersihan sungai, pembibitan bakau, dan pembangunan rumah warga (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024).

Tabel 4. Perbandingan Anggaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022–2024

Tahun	Anggaran	Persentase Realisasi
2022	Rp 4.513.549.700	100%
2023	Rp 1.863.343.360	100%
2024	Rp 3.055.526.942	100%

Sumber : Dokumen RKP Kampung Nafri Tahun 2022–2024

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mengalami fluktuasi dari Rp587.292.900 pada tahun 2022 menjadi Rp492.447.120 pada tahun 2023 dan Rp547.890.984 pada tahun 2024, dengan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, festival seni dan budaya, pemeliharaan rumah adat, kegiatan kepemudaan

dan olahraga, pembinaan karang taruna, perayaan hari besar keagamaan, operasional PKK, pelatihan menjahit, pelatihan pengolahan sampah plastik, kursus membatik, wisata rohani, dan pelatihan menulis serta pembuatan konten (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024).

Tabel 5. Perbandingan Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2022–2024

Tahun	Anggaran	Persentase Realisasi
2022	Rp 587.292.900	100%
2023	Rp 492.447.120	100%
2024	Rp 547.890.984	100%

Sumber : Dokumen RKP Kampung Nafri Tahun 2022–2024

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan dari Rp153.922.300 pada tahun 2022 menjadi Rp556.171.000 pada tahun 2023 sebelum menurun menjadi Rp348.386.000 pada tahun 2024, dengan kegiatan meliputi pembentukan dan pelatihan BUMKam, bantuan jaring dan perahu nelayan, pengadaan bibit pinang dan durian, pembuatan kebun hortikultura, bimbingan teknis aparatur dan BAMUSKAM, sosialisasi KDRT, narkoba, dan pola asuh anak, revitalisasi BUMKam, penyusunan AD/ART BUMKam, pelatihan pengurus BUMKam, pembuatan kandang dan bibit ternak babi serta ayam, dan penyertaan modal BUMKam (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024).

Tabel 6. Perbandingan Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022–2024

Tahun	Anggaran	Persentase Realisasi
2022	Rp 153.922.300	100%
2023	Rp 556.171.000	100%
2024	Rp 348.386.000	100%

Sumber : Dokumen RKP Kampung Nafri Tahun 2022–2024

Bidang Penanggulangan Bencana mengalami penurunan dari Rp721.585.000 pada tahun 2022 menjadi Rp256.200.000 pada tahun 2023 dan Rp241.200.000 pada tahun 2024, yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024).

Tabel 7. Perbandingan Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2022–2024

Tahun	Anggaran	Persentase Realisasi
2022	Rp 721.585.000	100%
2023	Rp 256.200.000	100%
2024	Rp 241.200.000	100%

Sumber : Dokumen RKP Kampung Nafri Tahun 2022–2024

2. Pembahasan

Studi ini menemukan bahwa penelitian ini difokuskan untuk menjawab mengenai Pemerintah Kampung Nafri menerapkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, yang tercermin dari perubahan prioritas pembangunan setiap tahunnya (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Pada tahun 2022, fokus pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Pada tahun 2023, terjadi pergeseran prioritas ke penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pada tahun 2024, pemerintah kampung mulai menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan. Struktur pendapatan Kampung Nafri selama periode penelitian seluruhnya berasal dari dana transfer, sedangkan Pendapatan Asli Kampung dan pendapatan lain-lain bernilai nol (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan Kampung Nafri masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan daerah, sehingga diperlukan optimalisasi potensi ekonomi lokal seperti pengembangan BUMKam, sektor pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, maupun usaha masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pada masa mendatang.

Tingkat realisasi anggaran yang mencapai 100% pada seluruh bidang menunjukkan bahwa pemerintah kampung mampu melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan sesuai dengan

dokumen perencanaan (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Namun demikian, keberhasilan realisasi anggaran tidak hanya diukur dari besarnya tingkat penyerapan, tetapi juga dari kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan pelaksanaan program yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Syahputri et al., 2025). Dukungan Dana Kampung terhadap pemberdayaan masyarakat ditunjukkan melalui pengalokasian anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat untuk berbagai program, seperti pembentukan dan penguatan BUMKam, pelatihan pengelolaan BUMKam, bantuan sarana ekonomi produktif, bantuan kepada kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur kampung, serta berbagai kegiatan pemberdayaan lainnya (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Selama periode penelitian, anggaran bidang pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari Rp153.922.300 pada tahun 2022 menjadi Rp556.171.000 pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi Rp348.386.000 pada tahun 2024 (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Meskipun mengalami penyesuaian, pemerintah kampung tetap mengalokasikan Dana Kampung untuk mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kampung Nafri.

Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Nafri selama periode Tahun Anggaran 2022–2024 telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran yang berlaku (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Namun demikian, penelitian ini hanya menganalisis aspek alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan studi dokumentasi, sehingga tidak mengukur efektivitas maupun dampak program pemberdayaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kampung Nafri. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Safkaur (2024) yang menunjukkan bahwa Dana Kampung di Kampung Nafri dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kampung melalui Dana Kampung dan Dana Prospek, namun penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga memperkuat temuan Yulindawati (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, serta penelitian Sapari et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Kampung Idadagi telah mengikuti aturan petunjuk teknis dan berjalan teratur. Perbedaan dengan penelitian Openg (2025) yang menemukan bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Kampung di Kampung Nafri tetap dialokasikan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat meskipun besaran alokasinya mengalami fluktuasi setiap tahunnya (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat serta kapasitas pengelolaan yang memadai.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Kampung di Kampung Nafri pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024 menunjukkan adanya perubahan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, alokasi Dana Kampung lebih difokuskan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar Rp4.513.549.700 atau sekitar 55,74% dari total belanja kampung, sementara Bidang Pemberdayaan Masyarakat hanya memperoleh alokasi sebesar Rp153.922.300 (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022). Alokasi tersebut digunakan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sebesar Rp100.000.000 dan pelatihan pengelolaan BUMKam sebesar Rp15.140.000 (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022). Pada tahun 2023, prioritas anggaran bergeser ke Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp3.836.465.488, namun Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp556.171.000 (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2023). Alokasi tersebut digunakan untuk bantuan jaring dan perahu nelayan, pengadaan bibit pinang dan durian, pembuatan kebun hortikultura, bimbingan teknis aparatur dan BAMUSKAM, sosialisasi KDRT, narkoba, dan pola asuh anak, revitalisasi BUMKam, penyusunan AD/ART BUMKam, serta pelatihan pengurus BUMKam (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2023). Pada tahun 2024, alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat kembali menurun menjadi Rp348.386.000, yang digunakan untuk pembuatan kandang dan bibit ternak babi, pembuatan kandang dan bibit ternak ayam, serta penyertaan modal BUMKam (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2024). Dengan demikian, alokasi

Dana Kampung dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Kampung Nafri mengalami fluktuasi, yaitu meningkat pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024, namun tetap dialokasikan untuk program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan kampung.

Realisasi Dana Kampung di Kampung Nafri pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024 seluruhnya menunjukkan tingkat realisasi sebesar 100% pada setiap bidang, termasuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Pada tahun 2022, realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp153.922.300 dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp153.922.300, yang digunakan untuk pembentukan BUMKam dan pelatihan pengelolaan BUMKam (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022). Pada tahun 2023, realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp556.171.000, yang digunakan untuk bantuan jaring dan perahu nelayan, pengadaan bibit pinang dan durian, pembuatan kebun hortikultura, bimbingan teknis aparatur dan BAMUSKAM, sosialisasi KDRT, narkoba, dan pola asuh anak, revitalisasi BUMKam, penyusunan AD/ART BUMKam, serta pelatihan pengurus BUMKam (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2023). Pada tahun 2024, realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp348.386.000, yang digunakan untuk pembuatan kandang dan bibit ternak babi, pembuatan kandang dan bibit ternak ayam, serta penyertaan modal BUMKam (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2024). Dengan demikian, realisasi Dana Kampung dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Kampung Nafri telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ditetapkan, yang ditunjukkan dengan tingkat realisasi sebesar 100% pada setiap tahun anggaran.

Kesesuaian antara alokasi dan realisasi Dana Kampung dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Kampung Nafri pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024 menunjukkan adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat realisasi sebesar 100% pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada setiap tahun anggaran (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022–2024). Pada tahun 2022, alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp153.922.300 dengan realisasi sebesar Rp153.922.300, yang menunjukkan adanya selisih antara alokasi dan realisasi, namun seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2022). Pada tahun 2023, alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp556.171.000 dengan realisasi sebesar Rp556.171.000 atau 100%, yang menunjukkan kesesuaian penuh antara alokasi dan realisasi (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2023). Pada tahun 2024, alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp348.386.000 dengan realisasi sebesar Rp348.386.000 atau 100%, yang juga menunjukkan kesesuaian penuh antara alokasi dan realisasi (Dokumen RKP Kampung Nafri, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi dan realisasi Dana Kampung dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Kampung Nafri pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024 telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran yang berlaku, meskipun terdapat fluktuasi besaran alokasi setiap tahunnya. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kampung Nafri mampu melaksanakan seluruh program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, serta menunjukkan adanya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Kampung Nafri.

2. Saran-Saran

Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi dengan menganalisis dokumen perencanaan dan laporan realisasi anggaran, sehingga hanya mampu menggambarkan aspek alokasi dan realisasi tanpa mengukur efektivitas maupun dampak program pemberdayaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan metode yang lebih komprehensif, seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat penerima manfaat, agar dapat mengkaji efektivitas, manfaat, serta dampak program pemberdayaan secara lebih menyeluruh. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan pengelolaan Dana Kampung di beberapa kampung lain, mengkaji aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta mengaitkan pengelolaan Dana Kampung dengan indikator pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik juga dapat digunakan untuk menguji pengaruh alokasi Dana Kampung terhadap tingkat pemberdayaan masyarakat, sehingga temuan penelitian dapat saling melengkapi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Untuk saran yang bersifat praktis, Pemerintah Kampung Nafri diharapkan tetap mempertahankan konsistensi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Kampung secara transparan dan akuntabel, dengan cara meningkatkan proporsi anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat melalui program yang lebih konkret seperti pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan sesuai potensi lokal, penguatan Badan Usaha Milik Kampung sebagai wadah pengembangan usaha ekonomi, pemberian bantuan sarana produksi atau modal usaha kepada kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas melalui pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap setiap program pemberdayaan dengan menetapkan indikator keberhasilan, sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Kampung melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi; Pemerintah Distrik Abepura dan Pemerintah Kota Jayapura diharapkan memberikan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap pengelolaan Dana Kampung, memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi, mendorong sinkronisasi antara program pembangunan kampung dengan program pembangunan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, serta memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Kampung dan sektor ekonomi produktif masyarakat; Masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan kampung melalui Musyawarah Kampung, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang didanai melalui Dana Kampung agar pengelolaan anggaran tetap transparan dan akuntabel, lebih aktif memanfaatkan program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah kampung, serta berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan potensi lokal seperti sektor perikanan, pariwisata, dan kerajinan; dan Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode yang lebih komprehensif seperti wawancara, observasi lapangan, atau penyebaran kuesioner, memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan pengelolaan Dana Kampung di beberapa kampung lain, serta mengkaji aspek partisipasi masyarakat dan indikator keberhasilan program pemberdayaan secara lebih mendalam, sehingga memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pengembangan ilmu ekonomi pembangunan dan pengelolaan keuangan publik di tingkat kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. LP3ES.
- Dokumen RKP Kampung Nafri. (2022). *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung Nafri Tahun Anggaran 2022*. Pemerintah Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
- Dokumen RKP Kampung Nafri. (2023). *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung Nafri Tahun Anggaran 2023*. Pemerintah Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
- Dokumen RKP Kampung Nafri. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung Nafri Tahun Anggaran 2024*. Pemerintah Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
- Efendi, Y. (2025). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*. Universitas Terbuka.
- Hartawan, A. F. (2025). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sukasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya)*. *International Proceeding of Social and Political Sciences Journal (IPSSJ)*, 2(4). <https://doi.org/10.61796/ipssj.v2i4.305>
- Indonesia, K. D. N. R. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, P. D. T. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Len, S. (2025). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Ngijo Kabupaten Malang (W. T. Hardianto & H. Sularsih, Ed.). Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.
- Longkotuy, M., Sapari, L. S. J., & Salosa, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya di Kampung Kmasen, Distrik Klamak, Kabupaten Sorong. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4 SE-Articles), 5004–5013.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications, Inc.
- Openg, D. M. M. (2025). Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Leraboleng Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Rasyid, R. (2000). *Makna dan Tujuan Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas.
- Safkaur, T. L. (2024). Implementation of Village Funds for Infrastructure Development in Nafri Village, Abepura District, and Jayapura City. *Journal of Social Science*, 5(1), 14–22. <https://doi.org/10.46799/jss.v5i1.743>
- Salingkat, S. P. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Universitas Tadulako.
- Sapari, L. S. J., Timisela, Y., & Gane, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Idadagi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4 SE-Articles), 4970–4983.
- Syahputri, E. O., Rafianda, M., Putri, N. A., Sihombing, B., & Harianto, S. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Desa Berdasarkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 – 2024. *Jurnal Ilmiah*, 03(01), 266–275.
- Thesia, M., Renouw, A. A., & Clan, E. (2022). Implementasi Penggunaan Dana Kampung terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. *Journal Management Entrepreneurship (JME)*, 2(1), 60–81. <https://doi.org/10.56942/jme.v2i1.129>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).
- Utama, U. W. (2021). Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(1), 34–46. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i1.1653>
- Wakman, H. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Benawa Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 802–816.
- Yulindawati, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.57>